

Ketahanan Ekonomi Nasional Masa dan Pasca Covid-19 Melalui Penguatan UMKM Indonesia

(National Economic Resilience During and Post-Covid-19 Through Strengthening Indonesian MSMEs)

Arman^{1*}, Ni Nyoman Sawitri², Asep Saefuddin³,

¹Program Studi Agribisnis, Universitas Trilogi, Jakarta, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Universitas Bhayangkara, Jakarta, Indonesia,

³Departemen Statistik, IPB University, Bogor, Indonesia,

Email: arman@universitas-trilogi.ac.id

Abstrak

Krisis *Coronavirus disease-19* (Covid-19) berdampak pada kinerja ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tingkat lokal dan nasional. Pelaku UMKM berusaha untuk bertahan dari terpaan krisis tersebut melalui efisiensi usaha dan program penyelamatan ekonomi nasional (PEN). Makalah ini bertujuan (1) mengkaji daya tahan UMKM terhadap gelombang krisis (2) formula kebijakan yang tepat untuk memperkuat daya saing UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Data bersumber dari Lembaga Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jurnal ilmiah nasional dan internasional dan sumber media. Secara Perlahan kondisi UMKM mulai bangkit dari krisis Covid-19 melalui kebijakan program PEN yang berjalan pada bulan september-desember 2020, pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19 persen (yoy), lebih baik dari pada pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49 persen (yoy). Penyaluran program PEN untuk UMKM berhasil dan efektif menjaga daya tahan UMKM dari terpaan krisis Covid-19. Pemerintah perlu menjaga momentum ekonomi, melalui sinergi UMKM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), digitalisasi dan *global supply chain* UMKM serta peningkatan anggaran PEN untuk UMKM. Disisi lain, pemerintah masih memiliki tugas yang berat untuk memangkas biaya logistik yang relatif masih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN.

Kata kunci: Ketahanan Ekonomi, PEN, UMKM

Abstract

The Coronavirus disease-19 (Covid-19) crisis has an impact on the economic performance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at local and national levels. MSME actors are trying to survive the crisis through business efficiency and the national economic rescue program (PEN). This paper aims to (1) examine the resilience of MSMEs against a wave of crisis (2) the right policy formula to strengthen the competitiveness of MSMEs. This research uses descriptive qualitative method using secondary data. The data is sourced from the Ministry of Small and Medium Enterprises Cooperatives, Bank Indonesia (BI), the Central Statistics Agency (BPS), the National Planning and Development Agency (Bappenas), national and international scientific journals and media sources. Slowly, the condition of MSMEs began to rise from the Covid-19 crisis through the PEN program policy which ran in September-December 2020, economic growth was better in the fourth quarter of 2020 by -2.19 percent (yoy), better than the growth in the third quarter 2020 by -3.49 percent (yoy). The distribution of the PEN program for MSMEs was successful and effective in maintaining the resilience of MSMEs from the Covid-19 crisis. The government needs to maintain economic momentum, through the synergy of MSMEs with State-Owned Enterprises (BUMN), digitalization and the MSME global supply chain as well as increasing the PEN budget for MSMEs. On the other hand, the government still has a tough task to cut logistics costs which are still relatively high when compared to several ASEAN countries.

Keywords: Economic Resilience, PEN, UMKM

Pendahuluan

Peran UMKM menjadi sangat strategis karena kontribusi terhadap PDB dan tenaga kerja sangat besar. UMKM mampu eksis dari terjangan badai krisis ekonomi 1997-1998, krisis keuangan global 2008-2009 dan krisis

pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. BPS (2014) pertumbuhan tenaga kerja krisis 1997-1998 sebesar -1,96 persen, Tahun 2008-2009 sebesar 2,64 dan krisis covid 19 sebesar 1,3 persen (Rafei et al., 2021). Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 mengakibatkan kontraksi ekonomi hingga mencapai 13 persen, inflasi

* Corresponding Author

yang sangat tinggi dan nilai rupiah terpuruk. Krisis 1997-1998 bukan hanya krisis ekonomi tetapi juga mengalami krisis politik yang disertai dengan suksesi kepemimpinan nasional yaitu lahirnya presiden baru tahun 1998 dan perubahan konfigurasi politik. Era reformasi mengubah sistem perpolitikan yang lebih demokratis dan terbuka. Krisis politik dan ekonomi yang disertai perubahan konfigurasi politik berdampak besar terhadap dunia usaha skala besar, tetapi tidak banyak memberikan pengaruh UMKM, khususnya sektor perkebunan dan kehutanan.

Tahun 2008-2009, krisis keuangan global dan penurunan harga komoditas pertanian menerpa Indonesia, namun badai krisis tidak berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Krisis keuangan global menyebabkan harga komoditi UMKM pada sektor yaitu karet, kelapa sawit/CPO (*cruide palm oil*) dan kakao turun (Bappenas 2009). Saat krisis terjadi usaha mikro dan kecil mampu menampung limpasan tenaga kerja dari usaha menengah dan usaha besar (Bappenas, 2009).

Krisis yang melanda tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global tahun 2009 mampu diatasi oleh pemerintah secara bertahap dengan menggunakan instrumen fiskal dan kebijakan “pelonggaran regulasi”. Meskipun krisis tersebut menghasilkan dampak yang berbeda, tetapi kebijakan ekspansif fiskal mampu memecahkan dan mengatasi persoalan tersebut. Tentu saja tidak hanya fokus difiskal, pemerintah juga menjaga kepastian suku bunga dan nilai rupiah agar stabilitas ekonomi bisa tercapai dengan baik. Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter serta “kebijakan pelonggaran regulasi” mampu mengantarkan UMKM tetap eksis terhadap ekonomi nasional (Bappenas, 2009; Tambunan, 2020)

Krisis Covid-19 yang melanda dunia, terutama Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Hampir seluruh kegiatan ekonomi memperoleh dampak yang besar terhadap “virus mematikan” tersebut. Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga pertumbuhan ekonomi sebesar -2,7 persen. Sementara pertumbuhan Tahun 2019-2020 year-on-year (yoy) trilwulan I –IV mengalami kontraksi yaitu -12,77, -21,31, -18,92 dan -17,51 (Ayuni et al., 2022). Krisis ekonomi akibat Covid-19 menyebabkan seluruh aktivitas ekonomi terhenti karena seluruh negara membatasi (hingga *lock down*) aktivitas sosial, ekonomi dan pemerintahan untuk mencegah penyebaran wabah virus tersebut.

Fachrizah et al., (2021) melakukan survei dampak Covid-19 terhadap UMKM tahun 2020. Hasil survei tersebut menemukan masalah finansial yang dialami oleh UMKM akibat wabah virus Covid-19. Jumlah usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk membayar gaji buruh sebesar 30 persen, sementara jumlah usaha kecil dan menengah yang kesulitan masing-masing sebesar 70 persen dan 65 persen. Selanjutnya, jumlah usaha mikro yang kesulitan membayar utang sebesar 30 persen sedangkan usaha kecil dan usaha menengah kesulitan membayar utang masing-masing sebesar 40 persen. Selanjutnya sekitar lebih 40 persen usaha mikro, lebih 30 persen usaha kecil dan 50 persen usaha menengah menghadapi masalah biaya tetap. Hasil ini menunjukkan UMKM menghadapi masalah biaya operasional, biaya tetap dan utang. Ketiga

pembiayaan ini sangat memengaruhi kegiatan produksi UMKM.

Keterbatasan keuangan dan pembiayaan menyebabkan sebagian besar usaha kecil dan menengah kesulitan untuk mempertahankan jumlah tenaga kerja. Bappenas (2020) menyebutkan jumlah usaha kecil dan menengah yang melakukan pemutusan hubungan kerja (termasuk merumahkan sementara) masing-masing sebesar 72 persen dan 76,5 persen, sementara usaha mikro sebesar 31 persen. Penurunan jumlah tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 mulai berlangsung pada bulan maret-april 2020. Pada bulan tersebut sebagian besar UMKM mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.

Pemerintah memberikan respon secara berbeda terhadap dampak krisis melalui kebijakan fiskal, moneter dan regulasi. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada krisis Covid-19 adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kebijakan fiskal, moneter dan regulasi. Program ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha untuk menjalankan usaha pada masa pandemi Covid-19. Secara rinci kebijakan dan program pemerintah mengatasi krisis tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Dampak krisis Tahun 1998, 2009, Covid-19 dan kebijakan pemerintah

Uraian	Krisis 1998	Krisis global 2009	Krisis Covid-19
Dampak Nasional	Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 13 persen	Ekonomi tumbuh 4,5 persen	Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi 2,7 persen
UMKM	UMKM, pertanian dan sektor informal tumbuh dan berkembang	Industri yang mengalami kontraksi industri makanan dan minuman, produk tekstil, alas kaki, furnitur dan rotan olahan.	Sebagian besar UMKM mengalami dampak, terutama industri menengah dan besar
Kebijakan pemerintah	Peningkatan ekspor dan konsumsi dalam negeri, debirokratisasi, deregulasi, jaringan pengaman sosial yaitu operasi pasar khusus, padat karya, bantuan keluarga miskin, pembiayaan usaha kecil menengah	Penurunan tarif PPh Badan orang pribadi, Subsidi pajak karyawan migas dan minyak goreng, potongan harga tarif listrik dan Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Penundaan angsuran pokok, dan suku bunga UMKM, insentif pajak UMKM, Penjaminan modal kerja dan Bantuan Presiden untuk UMKM.
Politik	Terjadi perubahan konfigurasi politik	Politik stabil	Politik masih relatif stabil dan mendapat dukungan dari parlemen

Uraian	Krisis 1998	Krisis 2009	global	Krisis Covid-19
Inflasi	Hiper inflasi	Relatif stabil		Stabil

Sumber: (Bappenas, 2009; Fachrizah et al., 2021; BI, 2015; Kurniasih et al., 2021)

Kajian Teori

Keunggulan utama UMKM adalah memiliki fleksibilitas terhadap perubahan pasar, sumber inovasi, pengelolaan sumber daya manusia yang mudah karena jumlah karyawan yang sedikit dan hubungan yang dekat antara pemilik dan karyawan, memiliki motivasi yang lebih kuat dan tingkat kontrol yang tinggi. Sisi lain, kelemahan usaha adalah inefisiensi, sebagai akibat dari biaya produksi yang tinggi per unit produk, volume penjualan yang lebih rendah, kurangnya spesialisasi, risiko pasar yang lebih besar karena hanya memiliki satu atau beberapa produk dan kesulitan penyediaan dana (Petkovska, 2015). UMKM berperan dan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Timur (Anugerah & Nuraini, 2021). Wibawa & Yusnita, (2019) menyatakan peran UMKM memiliki pengaruh yang lebih luas terhadap ekonomi lokal dan nasional meliputi; (1) pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal; (2) penyerap tenaga kerja; (3) sarana pengentasan kemiskinan; serta (4) UMKM sebagai pemerataan perekonomian rakyat kecil.

Peran UMKM ditunjukkan dengan banyaknya pelaku usaha dan ragam usaha yang berbasis UMKM. Jumlah UMKM yang tercatat pada lembaga Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 64,19 juta unit yang terdiri; (1) jumlah usaha mikro lebih dari 63,35 juta unit usaha (89,04 persen), (2) jumlah usaha kecil lebih dari 783 ribu unit usaha (4,84 persen) dan (3) jumlah usaha menengah sebesar lebih dari 60 ribu unit usaha (3,13 persen) (Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020–2024, 2021). Jumlah yang besar tersebut menyebabkan UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97 persen meliputi; (1) jumlah tenaga kerja yang terserap oleh usaha mikro sebesar lebih 107 juta orang, (2) usaha kecil sebesar 5,8 juta orang dan (3) usaha menengah sebesar 3,77 juta orang (Fachrizah et al., 2021). Jumlah tenaga kerja dan jumlah usaha yang sangat besar menyebabkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai 61,07 persen. Peran UKM dalam kancah perdagangan internasional masih relatif kecil, dimana kontribusinya masih berkisar 14,37 persen (Agung Bayu Purwoko et al., 2020).

Sayangnya pencatatan keuangan UMKM sangat sederhana, yaitu hanya terkait dengan pembelian bahan baku serta sebagian biaya yang mereka keluarkan saja. Sehingga sangat sulit untuk mengetahui seberapa besar biaya keseluruhan yang dibutuhkan dalam sekali produksi, dan menentukan laba usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha UMKM belum menerapkan pencatatan akuntansi yang baik dan memadai (Savitri & Saifudin, 2018). Damayanti & Rompis (2021) menyatakan ketersediaan laporan keuangan membantu proses

pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sederhana.

Sitharam & Hoque (2016) membagi kendala UMKM di Afrika Selatan kedalam lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan teknologi, kompetensi dan keterampilan manajerial, serta akses ke keuangan. Faktor eksternal meliputi, regulasi, ekonomi makro, persaingan dan globalisasi. Persaingan merupakan faktor lingkungan eksternal memengaruhi kinerja UKM.

Persoalan utama UMKM adalah kurang berdaya, kurang modal usaha, kompetensi dan keterampilan rendah dan rendahnya informasi (Muriithi, 2017; Adisa et al., 2014). Di Indonesia, tiga kendala utama bagi lembaga pembiayaan untuk menjalankan peranannya dalam pengembangan UMKM, yaitu (1) sulitnya menilai UMKM yang *feasible* dan *bankable* yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian kredit; (2) Animo UMKM yang rendah terhadap upaya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dan (3) Sebagian besar UMKM belum melakukan pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dengan usaha (Kementerian Perdagangan, 2013). Permasalahan lainnya dalam UMKM adalah bahan baku dan modal. Ada jenis usaha yang bahan bakunya tidak mudah diperoleh di pasar. Oleh karena itu strategi pengembangan usaha UMKM lebih ditekankan pada pemenuhan bahan baku (Hartono & Hartomo, 2016).

Pemerintah Malaysia membangun *management framework* dengan melibatkan 26 lembaga, 2 kementerian dan 9 lembaga perbankan untuk memberikan bantuan keuangan UMKM dalam bentuk pinjaman lunak, hibah, pembiayaan ekuitas, modal ventura, skema penjaminan dan insentif pajak (Muhammad et al., 2009). Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk meningkatkan kemampuan teknologi UMKM dan skema kebijakan nasional pembelajaran antarperusahaan yang telah mengembangkan teknologi untuk meningkatkan daya saing UMKM (Albaladejo, 2001).

Tambunan (2019) pengembangan UMKM di Indonesia melalui: (1) pelatihan yang berfokus pada pemasaran online, kewirausahaan, manajemen, dan peningkatan kualitas produk dan efisiensi bisnis; (2) penyediaan fasilitas pendanaan alternatif dengan suku bunga rendah disertai dengan kemudahan akses; dan (3) memberikan bantuan langsung di tempat produksi untuk pengusaha baru di tahun-tahun pertama mereka menjalankan bisnis. UMKM harus memperkuat orientasi pembelajaran dan inovasi mereka untuk meningkatkan kinerja bisnis (Suliyanto & Rahab, 2011). Lembaga pembiayaan perlu membantu promosi dengan mengikutsertakan UMKM ke pameran, konsultasi mengenai pengembangan usaha dan memfasilitasi keberadaan tempat usaha (Kementerian Perdagangan, 2013). Lebih lanjut pengembangan UMKM harus didukung dengan strategi pengembangan pemasaran terkait dengan (1) omzet penjualan dari sisi produk dan pemasaran; (2) kemitraan dengan perusahaan besar; (3) hubungan kerjasama dengan pemasok, ritel modern dan pemerintah; (4) daya saing; (5) teknologi informasi sebagai sarana promosi dan memperluas jaringan pasar; (6) mutu produk yang lebih sehat dalam rangka kompetisi harga; (7) mutu SDM dalam hal manajemen dan

pemasaran; dan (8) rantai pasok bahan baku dan produk jadi secara efektif dan efisien (Dewi, 2018). Saluran pemasaran memiliki prioritas tertinggi sebagai alternatif strategi penguatan inovasi wirausaha di wilayah pesisir. Dengan saluran pemasaran yang baik dapat mengubah pembeli potensial menjadi pesanan yang menghasilkan laba, karena saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar tetapi juga membentuk pasar. Hal ini dapat membangkitkan motivasi mereka untuk menghasilkan produk dan layanan baru sebagai pengembangan usaha (Hasanah, 2021). *Entrepreneurial marketing* berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran dan daya saing. Selanjutnya kinerja pemasaran berpengaruh positif terhadap daya saing (Rusminah, 2019).

UMKM memerlukan strategi pengembangan produk, pasar dan penetrasi pasar yang disertai penguatan sisi internal dan eksternal serta dukungan pemerintah. Teknologi yang sederhana, pengetahuan yang rendah dan tenaga kerja yang terampil pada UMKM pangan memberikan pengaruh internal UMKM. Sementara pengaruh sisi eksternal, pelanggan baru, loyalitas pelanggan fluktuasi harga bahan baku (Ginting, 2018). Secara parsial dukungan pemerintah, pemasaran UMKM, dan jenis usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha (Nandita, 2018).

Hidayah (2019) menyatakan kelompok usaha dan pemerintah memiliki peran untuk mengatasi ketersediaan dan akses modal usaha, harga bahan baku yang tinggi, jumlah tenaga kerja semakin berkurang, rendahnya harga jual produk, tidak adanya pembukuan usaha, masih rendahnya peran kelompok pengusaha UMKM dan pemerintah dalam pengembangan usaha (Mursid, 2017). Tingkat kepercayaan dan norma sosial melalui jaringan pelaku UMK memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kinerja UMK yaitu *output* produksi, proses internal dan kemampuan sumber daya. Rasa percaya yang kuat dan jaringan yang baik dengan pihak ekseternal usaha memberikan kemudahan pelaku usaha untuk memperoleh dukungan finansial maupun nonfinansial. Jaringan usaha mampu meningkatkan inovasi dan daya kreatif dan meningkatkan akses pengetahuan pelaku usaha ((Analia, 2019).

Pengembangan UMKM harus didukung dengan pembiayaan, baik dari pemerintah maupun swasta. Penentu aksesibilitas UMKM pada sumber pembiayaan formal dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan, kepemilikan surat tanah, umur, posisi pemilik, keikutsertaan pengusaha dalam pelatihan, total pendapatan, pengalaman usaha dan modal usaha memengaruhi aksesibilitas Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) nonpangan dan pangan pada sumber pembiayaan formal (Azriani, 2014). UMKM seringkali kurang peduli persyaratan formal perusahaan, disisi lain kelengkapan syarat formal hukum sangat dibutuhkan untuk mengajukan kredit dan pembiayaan usaha baik dari pemerintah dan lembaga keuangan. (Anita, 2014). Peran Koperasi terhadap UMKM yaitu pinjaman modal, akses teknologi yang lebih modern, memberi akses informasi dan promosi dan pendampingan dan pelatihan usaha (Anggara, 2015).

Standarisasi Manajemen Risiko UMKM

Pengendalian mutu UMKM dipengaruhi oleh keterampilan sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan (Watumlawar, 2017). Manajemen mutu produk UMKM yaitu pengolahan bahan baku, penyimpanan bahan baku, dan proses produksi (Khairi, 2017). Dewi (2017) menyatakan UMKM perlu mengoptimalkan penerapan standar melalui *Good Manufacturing Practices* (GMP). Produk UMKM yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena penerimaan dan kepercayaan pasar. Ini yang menyebabkan produk UMKM memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena sudah terstandarisasi dan tersertifikasi (Pari, 2020).

Standarisasi mendorong UMKM memiliki daya saing dengan produk luar. UMKM diharapkan memiliki produk yang harganya terjangkau tetapi memiliki kualitas yang terjamin (Prasatya, 2017). Selain produk yang terstandarisasi, UMKM perlu mengembangkan desain *eyecatching*. Pengembangan desain berbasis *kansei eyecatching* merupakan instrumen untuk membangun persepsi konsumen terhadap suatu produk (Azrifirwan, 2017). UMKM perlu menyusun *risk register* beserta bentuk pencegahan dan penanganannya terhadap berbagai kemungkinan risiko yang bisa muncul (Qintharah, 2016). UMKM perlu membangun lini bisnis baru tetapi tetap mempertahankan *core* bisnis sehingga tidak menyulitkan pada proses adaptasi usaha, modal dan sumber daya (Oktora, 2017).

Standarisasi dan *business coaching* perlu didukung dengan kepemimpinan UMKM yang kuat. Kepemimpinan yang kuat memberikan pengaruh manajemen pelaksanaan dan manajemen risiko yang baik. UMKM yang tidak didukung dengan kepemimpinan yang baik sulit mengembangkan dan menjalankan usaha. Kepemimpinan merupakan bagian penting untuk mengembangkan orientasi kewirausahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap inovasi, proaktif dan kompetitif (Wulandary, 2018).

Pengembangan Digitalisasi UMKM

Pengembangan *Digital Technology* (DT) mampu menjaga kelangsungan bisnis selama gangguan ekstrem dan guncangan masyarakat global akibat Covid-19. Oleh karena itu, UMKM harus dibekali kemampuan mengembangkan DT sebagai sistem kerja dalam organisasi UMKM (Papadopoulos et al., 2020). Pengembangan DT dan sistem informasi memberikan kemudahan tenaga kerja UMKM mengambil keputusan yang lebih efisien dalam organisasi yang saling berasosiasi serta mendorong tenaga kerja dapat mengembangkan kreativitas yang efisien dan *multiskilled* pada lingkungan UMKM (Mumford, 2003).

Pengembangan DT memiliki keeratan dengan Strategi Knowledge Management (KM) yang harus dikembangkan dan diselaraskan melalui partisipasi aktif manajemen puncak. Praktik KM selayaknya tidak hanya berada pada perusahaan skala besar tetapi mesti hadir pada skala usaha yang lebih kecil yaitu UMKM (Pillania, 2008). KM berperan penting mengatur dan mentransfer sistem informasi dalam sistem kerja informasi (Nasser H. Zaided

et al., 2012). Klapper (2006) penggunaan saluran elektronik dapat memangkas biaya dan menyediakan layanan UKM yang lebih besar di pasar negara berkembang.

Potensi Indonesia mampu berkembang pesat bila menggunakan DT dan KM. Ipsos (2021) menyatakan terdapat 73 persen konsumen yang menilai belanja *online* lebih mudah dibandingkan belanja *offline*. Sementara itu terkait pemilihan merek, 59 persen konsumen di Indonesia tidak setuju bahwa merek global memiliki produk lebih baik dari merek lokal. Lebih jauh 87 persen konsumen di Indonesia memilih membeli produk lokal dibandingkan produk global. Ini artinya pasar lokal dapat berkembang bila UMKM memanfaatkan 73 persen pasar dengan sistem digital dan KM.

Praktik *e-commerce* mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menghemat biaya transaksi, menghilangkan batasan ruang dan waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi penjual dan pembeli, dan mengurangi biaya periklanan dan transportasi (Bahtiar, 2020). Hasil riset tercatat Gojek telah memberikan kontribusi sebesar Rp249 triliun dalam rangka membantu perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Jumlah tersebut setara dengan 1,6 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020 (UI & Walandouw, 2019). Tingkat penggunaan internet dengan mengadopsi digital marketing yang semakin tinggi berpengaruh terhadap manfaat pemasaran, namun harus didukung dengan pendidikan sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manfaat digital marketing dan keberhasilan (kinerja) usaha (Afifah, 2018).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Elliott & Timulak, 2005). Sumber data berasal dari dokumen Lembaga Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), hasil penelitian dari lembaga pemerintah, Jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian dalam bentuk tesis dan disertasi, peraturan dan undang-undang yang terkait serta sumber media. Data sekunder selanjutnya dielaborasi dan diformulasi untuk menjelaskan dan menguraikan ketahanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada saat Covid-19 mewabah diberbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Masa krisis UMKM terjadi pada bulan Maret-April 2020, setelah bulan April kondisi UMKM perlahan mulai bangkit. Setelah kebijakan program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan pada bulan september-desember 2020, geliat UMKM mulai kembali membaik (Bappenas, 2020). pertumbuhan Industri Mikro dan kecil Tahun 2019-2020 *year-on-year* (YoY) triwulan I hingga triwulan IV mengalami kontraksi yaitu -12,77, -21,31, -18,92 dan -17,51 (BPS, 2020a). Kurniasih et al. (2021)

pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19 persen (YoY) tetapi lebih baik dari pada pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49 persen (YoY). Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07 persen Tahun 2020 tetapi tren perbaikan ekonomi terjadi pada triwulan IV 2020 pada hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha.

Daya Tahan UMKM

Dampak pembukaan kembali aktivitas ekonomi menyebabkan *turning point* pertumbuhan ekonomi. Semula pertumbuhan tahun 2020 ekonomi triwulan II sebesar -5,32 persen (YoY) meningkat menjadi -3,49 persen (YoY). Meskipun terkontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan lebih baik dari pada triwulan III yaitu -2,19 persen (YoY). Hasil ini menunjukkan program PEN mampu berjalan efektif. Membaiknya kembali perekonomian pada triwulan IV menunjukkan program pemerintah terhadap pemulihan ekonomi UMKM berdampak baik. Secara keseluruhan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,7 persen. Pada triwulan II pertumbuhan ekonomi tumbuh hingga 7 persen tahun 2021 (Ayuni et al., 2021).

UMKM secara perlahan mampu keluar dari krisis dan mulai tumbuh di triwulan IV tahun 2020 dan awal tahun 2021. PEN pemerintah dinilai berhasil karena mampu menggenjot perekonomian UMKM. Tahap awal, pemerintah meluncurkan program subsidi bunga hingga Rp34,15 triliun, insentif pajak (PPh 21 DTP) sebesar Rp28,06 triliun dan penjaminan modal kerja Rp5 triliun (Fachrizah et al., 2021)

Pemerintah juga memberikan bantuan berupa penundaan cicilan pokok selama 6 bulan disertai dengan pembebasan bunga cicilan selama 3 bulan dan memotong beban cicilan rumah sebesar 50 persen selama 3 bulan. Bunga kredit dibebankan sebesar hanya 6 persen selama 3 bulan pertama dan 3 persen selama 3 bulan berikutnya. Usaha menengah dibebankan sebesar 3 persen selama 3 bulan pertama dan 2 persen selama 3 bulan berikutnya (Fachrizah et al., 2021).

Penjaminan kredit bagi UMKM yang meminjam hingga Rp10 miliar diserahkan kepada perusahaan milik negara yaitu PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo. Ini bertujuan untuk membantu UMKM yang mengalami kesulitan modal untuk mengakses pendanaan perbankan dan keuangan lainnya. Pemerintah memberikan perlindungan melalui penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp5 triliun. Ini bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan pelaku usaha sektor riil.

Kepala Mandiri Institute, Wicaksono, (2021) pada laman media online nasional kontan menyatakan hasil survei persepsi PEN terhadap UMKM. Terdapat 46 persen responden UMKM menyatakan program PEN sangat membantu pembiayaan operasional dan sebanyak 37 persen pelaku UMKM program tersebut membantu. Hanya 17 persen responden yang menyatakan program PEN tidak membantu UMKM. Hasil ini menunjukkan program PEN pemerintah 83 persen pelaku UMKM

merasakan manfaat dari program PEN pemerintah. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia pada laman antarnews.com (2021) menyatakan 99 persen UMKM pendaftar PEN telah memperoleh bantuan dari pemerintah. Bantuan presiden yang menyasar UMKM yang *unbankable* sebesar Rp21,86 triliun telah terealisasi akhir 2020. Kebijakan dapat diteruskan setelah Covid 19.

Kurniasih et al. (2021) menyatakan kinerja ekspor february 2021 mencapai USD15,27 miliar, naik 8,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Kenaikan harga produk UMKM yang naik pada sektor pertanian adalah minyak kelapa sawit dan karet. Sektor pertanian tumbuh sebesar 3,16 persen pada periode tersebut. Komoditas yang mengalami kenaikan ekspor adalah tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah, hasil hutan bukan kayu dan lada hitam. Sementara komoditas yang mengalami penurunan ekspor adalah sarang burung walet, kopi, ikan segar, mutiara hasil tangkap dan mutiara hasil budidaya. Industri pengolahan berbahan dasar pertanian yang mengalami peningkatan ekspor adalah kimia dasar organik yang bersumber dari hasil hutan.

Tahun 2021 dan pasca Covid 19, pemerintah menjaga momentum ekonomi, dengan menitikberatkan penguatan UMKM, Sinergi UMKM dengan BUMN, digitalisasi dan global supply chain UMKM. Skema pendanaan UMKM digenjot untuk memperkuat UMKM nasional melalui (1) peningkatan porsi pendanaan, (2) peningkatan plafon kredit, (3) peningkatan besaran kredit dan (4) tingkat suku bunga yang kompetitif. Semula, porsi pendanaan hanya menjangkau sekitar 18-20 persen akan ditingkatkan menjadi lebih 30 persen UMKM. Program ini diharapkan dapat menyasar UMKM yang belum mendapat pendanaan dari pemerintah agar bisa meningkatkan produktivitasnya pasca Covid-19. Klusterisasi sentra UMKM menjadi faktor penting untuk menyalurkan pendanaan agar lebih tepat sasaran. UMKM yang memiliki daya tahan dan prospek membangun ekonomi daerah dan nasional, namun belum tersentuh pendanaan dari pemerintah, perlu memperoleh pendanaan untuk meningkatkan *economic of scale* dan *economic of scope* (Fitrama et al., 2021).

Sumber keuangan dari perbankan masih sering menjadi kendala bagi UMKM karena berisi persyaratan yang relatif ketat. Ketentuan formalitas hukum, agunan dan jenis usaha seringkali menghambat UMKM untuk memperoleh sumber pembiayaan dari perbankan. Panduswanto (2015) kredit UMKM menghasilkan *output* yang tidak elastis (tidak berdampak besar terhadap output produksi UMKM). Pengaruh kenaikan kredit pada skala UMKM relatif tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *output* UMKM. Pemerintah perlu lebih cermat untuk membantu UMKM keluar dari krisis Covid-19 melalui sumber pembiayaan yang lebih mudah tetapi terukur dan tidak melanggar aturan. Sumber pembiayaan merupakan salah satu instrumen untuk menjaga momentum ekonomi saat krisis dan pasca Covid-19.

Salah satu instrumen pembiayaan UMKM untuk mengatasi krisis Covid-19 adalah model pembiayaan tanpa bunga. Yulianto (2021) keunggulan model pembiayaan tanpa bunga adalah penilaian kelayakan usaha

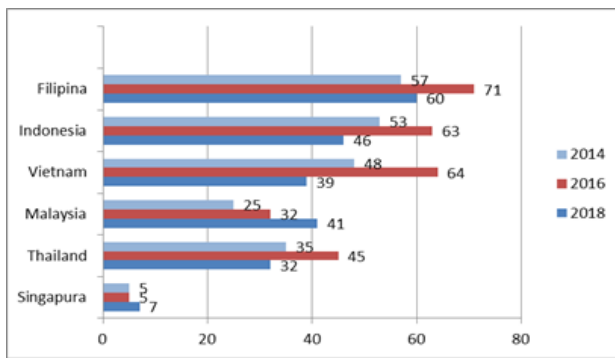
berbasis tanpa bunga yang adaptif merespon risiko usaha yang sulit diprediksi. Model ini menghilangkan risiko pemilik usaha yang menanggung secara penuh risiko usahanya, sementara pemilik modal tidak hanya berperan mengambil keuntungan dari bunga hasil pinjaman. Pemilik modal dan pemilik usaha mengedepankan prinsip *win-win collaboration*, melalui kontrak kesepakatan, yang meliputi nisbah (proporsi) multi kondisi, pembagian nisbah (proporsi) berdasarkan perhitungan hasil akhir usaha, dan klausul *Partnership Nisbah Agreement* (PNA). Pembiayaan tanpa bunga selayaknya sudah selayaknya menjadi instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatasi dan memitigasi segala risiko yang dibebankan kepada UMKM selaku debitor. Pembiayaan tanpa bunga melalui kerjasama (*partnership*) merupakan momentum untuk menjaga daya tahan UMKM dan pertumbuhan ekonomi saat krisis dan pasca Covid-19.

UMKM dan *Global Supply Chain*

Biaya *Global Supply Chain* di Indonesia tergolong tinggi di negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) yaitu sebesar 24 persen terhadap PDRB Nasional. Nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan biaya logistik Vietnam (20 persen terhadap PDRB), Thailand (15 persen terhadap PDRB), Malaysia (13 persen terhadap PDRB) dan Singapura (8 persen terhadap PDRB). Peringkat Indonesia berdasarkan *Logistic Performance Index* (LPI) Tahun 2018 berada pada posisi ke 46. Posisi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39) dan Malaysia (41) tetapi lebih tinggi dari pada Filipina (60). Posisi Indonesia terus membaik yaitu berada pada peringkat 53 tahun 2014 menjadi peringkat 46 tahun 2018. Meskipun demikian pemerintah masih perlu berupaya keras untuk menekan biaya logistik. Mencontoh negara Vietnam yang berhasil melewati Malaysia dalam upaya menekan biaya logistik. Peringkat indeks kinerja logistik di beberapa negara ASEAN tersaji pada Gambar 1.

(Arvis et al., 2010) menjelaskan terdapat 6 indikator untuk mengukur kinerja logistik yaitu (1) Efisiensi pengelolaan bea cukai dan perbatasan izin, (2) Kualitas infrastruktur terkait perdagangan dan transportasi, (3) Kemudahan mengatur harga internasional, (4) Kompetensi dan kualitas layanan logistik, (5) Kemampuan untuk melacak dan *tracing* kiriman dan (6) Frekuensi pengiriman terhadap penerima barang. Efisiensi pengelolaan bea cukai memberikan pengaruh pada masa waktu tunggu barang yang semakin efisien.

Setidaknya ada 3 hal penting untuk meningkatkan kinerja UMKM terkait dengan manajemen logistik yaitu (1) efisiensi biaya logistik, (2) kualitas layanan logistik dan (3) kinerja logistik dari sisi waktu. Secara rinci perbandingan LPI tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. *Logistic Performance Index*, 2018

Sumber: Arvis et al., 2010.

Sinaga (2021) menyatakan praktik manajemen rantai pasok UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keunggulan bersaing yaitu keunggulan bersaing pada kualitas produk, inovasi produk, dan time to market. Lebih jauh, manajemen rantai pasok dapat berjalan secara efektif dan efisien bila didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi information, transaction, interaction dan customization. Hubungan kerjasama dengan supplier, berbagi informasi, kualitas informasi, dan peramalan dapat berjalan dengan baik dengan sistem rantai pasok yang baik. Selanjutnya manajemen rantai pasok berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas produk, inovasi produk, dan time to market. Semakin intensif penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi semakin besar positif pengaruhnya terhadap praktik manajemen rantai pasok dan keunggulan bersaing perusahaan. Pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing mampu meningkatkan kinerja perusahaan terutama pada pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, margin laba penjualan, dan posisi keunggulan. Ini menunjukkan manajemen rantai pasok UMKM memiliki peran strategis untuk mempercepat UMKM keluar dan mengatasi krisis Covid-19 dan memperkuat UMKM pasca Covid 19.

Sinergi Penta-Helix untuk Membangun UMKM Berbasis Digital

BUMN telah mengupayakan UMKM sebagai mitra supplier atau vendor untuk memenuhi perusahaan plat merah negara. Program BUMN tersebut diberi nama Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM). BUMN membolehkan dan memberikan kesempatan kepada UMKM sebagai supplier untuk nilai proyek kurang dari Rp14 miliar (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., 2021). Program PaDi UMKM merupakan upaya dari BUMN meningkatkan peran UMKM dan membangun sinergi dengan UMKM. Lebih lanjut, keterlibatan UMKM merupakan upaya BUMN untuk meningkatkan produk lokal terserap pada pasar dalam negeri. BUMN diharapkan dapat menjadi pelopor utama pendorong produk lokal (memiliki TKDN hingga 100 persen) dalam negeri.

Sinergi Penta helix yang melibatkan BUMN, UMKM, Pemerintah, Universitas dan masyarakat dapat semakin

memperkuat posisi UMKM sebagai pelopor pembangunan dan kinerja ekonomi nasional. Pemerintah perlu menata kembali koordinasi dan kerjasama antar K/L untuk memperkuat UMKM. Program yang dijalankan oleh kementerian Koperasi dan UKM tidaklah cukup jika tidak mendapat dukungan penuh dari K/L lainnya. Sinergi tersebut terutama dalam pengembangan UMKM meliputi: (1) Kementerian telekomunikasi diharapkan dapat berperan mendorong dan melatih UMKM mengembangkan IoT (Internet of Things), (2) Kementerian perindustrian terlibat dalam industri pengolahan dalam rangka mendorong nilai tambah, (3) BUMN melalui perusahaan milik negara sebagai offtaker produk yang dihasilkan UMKM, (4) Kementerian Keuangan mendorong peningkatan dan pengelolaan anggaran serta jaminan usaha, (5) perbankan memberikan pelatihan dan keterampilan UMKM dalam pengelolaan keuangan dan (6) Kementerian Industri Kreatif mendorong komunitas kreatif, kesenian dan budaya untuk berperan aktif. Selain BUMN memberikan peran UMKM sebagai vendor di beberapa perusahaan negara, BUMN perlu bekerjasama dengan kementerian telekomunikasi dan Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan Bisnis digital IoT. Pembangunan UMKM berbasis IoT akan memudahkan K/L memperoleh data yang berbasis real time.

UMK selaku mitra BUMN dan Pemerintah perlu mengembangkan usahanya berbasis digital. Pembangunan data berbasis digital akan memberikan kemudahan bagi stakeholder untuk mengecek dan mengevaluasi perkembangan UMKM dari waktu ke waktu yang bersifat real time. Selanjutnya peran penta-helix mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk menghasilkan inovasi teknologi yang berguna pakai bagi perkembangan inovasi UMKM.

Pembangunan UMK berbasis IOT untuk Ketahanan Ekonomi

Terdapat 5 keuntungan pengembangan UMKM berbasis Internet of Things (IoT) di antaranya adalah (1) real time marketing, (2) efisiensi beban sumber daya dan mudah mengontrol dan mengevaluasi UKM, (3) pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data, (4) meningkatkan kualitas data UMKM dan (5) memudahkan komunikasi antarstakeholder. Pemahaman yang tinggi dalam penggunaan IoT dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), khususnya penggunaan sarana seluler, dapat memberikan kesesuaian dan kemudahan pelaku usaha. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan usaha, pertumbuhan usaha, kualitas dan daya saing (Yanti, 2018). Pelaku usaha UMKM sudah harus memulai mengembangkan usahanya berbasis IoT dan e-commerce. Insani (2021) menyatakan program pelatihan terkait e-commerce harus menjadi program utama pemerintah untuk memberikan kemudahan pelaku UMKM mengadopsi teknologi. Pemerintah memberikan pendampingan on line marketing dan e-commerce untuk memastikan pelaku UMKM dapat mengimplementasikan e-commerce secara terintegrasi. Perusahaan yang menggunakan e-commerce dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan jangkauan usaha dan

kapasitas produksi. Penggunaan e-commerce sebagai media promosi UMKM disertai dengan penerapan Standard Operational Procedure (SOP) dan menerapkan GMP (Good manufacturing Practices) merupakan instrumen strategis untuk menjaga adaptasi UMKM saat pandemi Covid-19 (Madyaratry, 2021).

Simpulan dan Implikasi Penelitian

Simpulan

Kondisi UMKM memiliki daya tahan yang baik terhadap krisis Covid-19. Perlahan UMKM mulai bangkit melalui kebijakan program PEN yang berjalan pada bulan september-desember 2020. Pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19 persen (yoy), lebih baik dari pada pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49 persen (yoy). UMKM secara perlahan mampu keluar dari krisis dan mulai tumbuh di triwulan IV tahun 2020 dan awal tahun 2021. Pemerintah meluncurkan program subsidi bunga hingga Rp34,15 triliun, insentif pajak (PPh 21 DTP) sebesar Rp28,06 triliun dan penjaminan modal kerja Rp5 triliun. Tahun 2021 dan Pasca Covid-19, pemerintah menjaga momentum ekonomi, melalui sinergi UMKM dengan BUMN, digitalisasi, sinergi perguruan tinggi dengan UMKM dan global supply chain UMKM. Skema pendanaan UMKM digenjut untuk memperkuat UMKM nasional melalui (1) peningkatan porsi pendanaan, (2) peningkatan plafon kredit, (3) peningkatan besaran kredit dan (4) tingkat suku bunga yang kompetitif.

Implikasi

Kebijakan klasterisasi sentra UMKM memiliki penting untuk menyalurkan pendanaan PEN lebih tepat sasaran. UMKM yang memiliki daya tahan dan prospek membangun ekonomi daerah dan nasional. Pemerintah masih memiliki tugas yang berat untuk memangkas biaya logistik yang relatif masih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa Negara ASEAN.

Referensi

- Adisa, T. A., Abdurraheem, I., & Mordi, C. (2014). The Characteristics and Challenges of Small Businesses in Africa: an Exploratory Study of Nigerian Small Business Owners. *Romanian Journal of Petroleum & Gas Technology*, *III(4)*, 1–14. https://www.researchgate.net/profile/Toyin-Adisa/publication/271530384_The_characteristics_and_challenges_of_small_businesses_in_Africa_An_exploratory_study_of_Nigerian_small_business_owners/links/54cf33fc0cf24601c09309b3/The-characteristics-and-challenge
- Afifah, A. N. (2018). *Penerapan Digital Marketing Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sektor Kreatif di Indonesia dan Malaysia*. Institut Pertanian Bogor.
- Agung Bayu Purwoko, Deswita, E. M., Siburian, Sutarto, I. G., A, J., Husman, Kinanti, K. A., Khulasoh, L., Tutuarima, M. T., Rahmawaty, M., Martami, M. M., Fitriana, R., Primayudha, R., Rachmanira, S., R, S. N., Atharinanda, S., & Yanfitr. (2020). *Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi; laporan Perekonomian Indonesia 2020*; Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2020.pdf
- Albaladejo, M. (2001). *Determinants and policies to foster the competitiveness of SME clusters: Evidence from Latin America* (No. 71; QEHWPS71). <http://workingpapers.qeh.ox.ac.uk/RePEc/qeh/qehwps/qehwps71.pdf>
- Analia, D. (2019). *Peran Modal Sosial Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Padang Sumatera Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Anggara, C. (2015). *Strategi Pengembangan Koperasi Guna Menggerakkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Dua Koperasi di Kabupaten Bogor)*. Institut Pertanian Bogor.
- Anita. (2014). *Pengaturan Prinsip Know Your Costumer oleh Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Studi UMKM Pakaian Jadi di Pasar Tanah Abang*. Universitas Indonesia.
- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). PERAN UMKM DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, *5(1)*, 27–41. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13772>
- Arvis, J.-F., Alina Mustra, M., Ojala, L., Shepherd, B., & Saslavsky, D. (2010). *Connecting to Compete 2010*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/24599>
- Ayuni, S., Larasaty, P., Pratiwi, A. I., Meilaningsih, T., Ihsan, M., Yulianingsih, E., & Riyadi. (2021). *Laporan Perekonomian Indonesia; Dampak Adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Terhadap Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfveve=ZjNIY2U3MTU3MDY0NTE0NzcyYjE4MzM1&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmklL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjE0MDkvMTcvZjNIY2U3MTU3MDY0NTE0NzcyYjE4MzM1L2xhcG9yYW4tcGVyZWt1bW9taWFluLWluZG9uZXNpYS0yMDIxLmh0bWw%3D&twoadfnua>
- Ayuni, S., Setiyawati, N., Ihsan, M., Yulianingsih, E., & Meilaningsih, T. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020* (S. Ayuni (ed.)). Badan Pusat Statistik.
- Azriani, Z. (2014). *Aksesibilitas Dan Partisipasi Industri Kecil Dan Rumah tangga Pada Sumber Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Dan Kesejahteraan Rumahtangga Di Kabupaten Bogor Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Azrifirwan. (2017). *Pengembangan Model Desain Kemasan Minuman Ringan Berbasis Kansei Engineering*. Institut Pertanian Bogor.
- Bahtiar, R. A. (2020). Potensi, Peran Pemerintah, dan

- Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 13–25. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1485>
- Bappenas. (2009). *Buku Pegangan; Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah*. Bappenas.
- BI. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil Bisnis UMKM.pdf](https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf)
- BPS. (2014). *Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2013*. <https://www.bps.go.id/statistictable/2014/01/30/1322/tabel-perkembanganumkm-pada-periode-1997--2013.html>
- Damayanti, R., & Rompis, A. I. (2021). Penguatan Peran UMKM melalui Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 379–390. <https://doi.org/10.24246/jms.v1i32021p379-390>
- Dewi, A. R. R. (2017). *Strategi Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Olahan Pertanian Melalui Penerapan Good Manufacturing Practices Pada Umkm Pangan Berdaya Saing Di Kota Bandung*. Institut Pertanian Bogor.
- Dewi, M. (2018). *Strategi Pemasaran UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing di Pasar Ritel Modern Carrefour (Kasus PT MadaniFood, Jakarta)*. Institut Pertanian Bogor.
- Elliott, R., & Timulak, L. (2005). Descriptive and interpretive approaches to qualitative research. In J. Miles & Paul Gilbert (Eds.), *A handbook of research methods for clinical and health psychology* (pp. 147–159). Oxford University Press. <http://www.mkc.ac.in/pdf/study-material/sociology/4thSem/Methods-Tradition-2.pdf>
- Fachrizah, H., Rezki, J. F., Revindo, M. D., Daniswara, R. V., Pathonangi, R., & Machmud, T. Z. (2021). *LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)*. www.kompak.or.id. <https://sikompak.bappenas.go.id/pustaka/download/599/id/2022laporan-analisis-kebijakan-penanggulangan-dampak-covid-19-bagi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm.pdf>
- Fitrama, R., Wijayanti, R., Galuh, R., Anggraini, Y. A., Sinaga, K. J., Tamba, R. U., Utami, A. A. P. S., Nugroho, I. A., Ayustira, Y. Z., Rienellda, L., Ulfa, D. F., Rahman, F., Anita, Ekasari, N., Lim, C., Raihan, A. M., Satya, J., Fatma, Z., Ardini, D., ... Pratita., P. (2021). *Sinergi Kebijakan Untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan dan Mendorong Intermediasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi*. Bank Indonesia.
- Ginting, A. P. (2018). *Strategi Pengembangan Umkm Pangan Berdaya Saing Di Kota Bandung*. Institut Pertanian Bogor.
- Hartono, H., & Hartomo, D. D. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UMKM DI SURAKARTA. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>
- Hasanah, R. U. (2021). *Model Penguatan Inovasi Wirausaha Di Wilayah Pesisir*. Institut Pertanian Bogor.
- Hidayah, U. (2019). *Sinergisitas Bumdes Dan Umkm Alas Kaki Di Desa Pagelaran Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Perdesaan*. Institut Pertanian Bogor.
- Insani, F. (2021). *Kajian Pengembangan Kawasan UMKM Digital Pengolah Makanan di Kota Bekasi*. Institut Pertanian Bogor.
- Ipsos. (2021). *Qualitative research into the consumption of food with expired 'use by' dates*. <https://doi.org/10.46756/sci.fsa.qfy700>
- Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020–2024, Pub. L. No. Nomor 5 Tahun 2021, 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177838/permenkop-ukm-no-5-tahun-2021>
- Kementerian Perdagangan. (2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41024626/analisis-peran-lembaga-1425035886-libre.pdf?1452395710=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPeran_Lembaga_Pembiayaan_Dalam_Pengembangan.pdf&Expires=1695814082&Signature=d0zmivwna-OdFglpTpy87SAEKHoE
- Khairi, I. (2017). *Efektivitas Penerapan Dan Strategi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Produk Bakso (Studi Kasus Dua Umkm Kabupaten Bogor)*. Institut Pertanian Bogor.
- Klapper, L. (2006). The role of factoring for financing small and medium enterprises. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 3111–3130. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.001>
- Kurniasih, A., Ayuni, S., Larasaty, P., Anam, C., Riyadi, Hastuti, A., Saputri, V. G., Pratiwi, A. I., & Meilaningsih, T. (2021). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020; Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi* (W. P. A. P & S. Ayuni (eds.)). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YmU3NTY4YWQ0OTY4MjlmMzVjZWU0YjI3&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmklL3B1YmxxpY2F0aW9uLzlwMjAvMDkvMTYvYmU3NTY4YWQ0OTY4MjlmMzVjZWU0YjI3L2xhcG9yYW4tcGVyZWtwbvm9taWFluLWluZG9uZX>

NpYS0yMDIwLmh0bWw%3D&twoadfnua

- Madyaratry, L. H. (2021). *Peningkatan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Keripik Pisang di Provinsi Lampung*. Institut Pertanian Bogor.
- Muhammad, M. Z., Char, A. K., Yaso'a, M. R. bin, & Hassan, Z. (2009). Small and Medium Enterprises (SMEs) Competing in the Global Business Environment: A Case of Malaysia. *International Business Research*, 3(1). <https://doi.org/10.5539/ibr.v3n1p66>
- Mumford, E. (2003). *Redesigning human systems*. IRM Press.
- Muriithi, S. M. (2017). African small and medium enterprises (SMEs) contributions, challenges and solutions. *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences*, 5(1), 38–48. [http://repository.daystar.ac.ke/bitstream/handle/123456789/3613/African Small and Medium Enterprises %20SMES%29 Contributions%2C Challenges and Solutions.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.daystar.ac.ke/bitstream/handle/123456789/3613/African%20Small%20and%20Medium%20Enterprises%20Contributions%20Challenges%20and%20Solutions.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Mursid, S. (2017). *Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kinerja Inovasi Umkm Agribisnis Di Kabupaten Bogor*. Institut Pertanian Bogor.
- Nandita, B. (2018). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberlanjutan Usaha Umkm Pengolahan Buah Dan Pengolahan Susu*. Institut Pertanian Bogor.
- Nasser H. Zaied, A., Soliman Hussein, G., & M. Hassan, M. (2012). The Role of Knowledge Management in Enhancing Organizational Performance. *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 4(5), 27–35. <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2012.05.04>
- Oktora, K. (2017). *Pengembangan UMKM Melalui New Product Development Berbasis Scrap*. Universitas Indonesia.
- Panduswanto, P. (2015). *Pengaruh Peningkatan Jumlah Pemberian Kredit Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Output UMKM di Indonesia*. Universitas Hasanuddin.
- Papadopoulos, T., Baltas, K. N., & Balta, M. E. (2020). The use of digital technologies by small and medium enterprises during COVID-19: Implications for theory and practice. *International Journal of Information Management*, 55, 102192. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102192>
- Pari, F. (2020). *Pendekatan Strukturasi Adaptif Dalam Komunikasi Inovasi Standar Nasional Indonesia Di Kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pub. L. No. 12, 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>
- Petkovska, T. (2015). The role and importance of innovation in business of small and medium enterprises. *Economic Development*, 1(2), 55–74.
- Pillania, R. K. (2008). Strategic issues in knowledge management in small and medium enterprises. *Knowledge Management Research & Practice*, 6(4), 334–338. <https://doi.org/10.1057/kmrp.2008.21>
- Prasatya, F. A. (2017). *Faktor Keberhasilan Usaha UMKM Jajanan Asing Kaki Lima Di Kota Serang*. Institut Pertanian Bogor.
- Qintharah, Y. N. (2016). *Perancangan Penerapan Manajemen Resiko Studi Kasus pada UMKM Saripakuan (CV Jarwal Maega Buana)*. Universitas Indonesia.
- Rafei, Y. D., Safrida, I. N., Ningrum, J., Adam, S. Y., Sukamto, A., & Fadillah, I. Ji. (2021). *Industri Mikro dan Kecil di Masa Pandemi Covid 19, 2020* (F. Dilia Bonita (ed.)). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDJmZjk3Y2MzNjVlOThlZWRkNGZhZDdm&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDgvMjUvZDZmZjk3Y2MzNjVlOThlZWRkNGZhZDdmL2luZHVzdHJpLW1pa3JvLWRhbi1rZWNPbC1kaS1tYXNhLXBhbmRibWktY292aWQtMTkt>
- Rusminah, S. (2019). *Pengaruh Entrepreneurial Marketing dan Kinerja Pemasaran terhadap Daya Saing pada UMKM sentra songkok di Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Institut Pertanian Bogor.
- Savitri, R. V., & Saifudin, . . (2018). PENCATATAN AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI PADA UMKM MR. PELANGI SEMARANG). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(2). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808>
- Sitharam, S., & Hoque, M. (2016). Factors affecting the performance of small and medium enterprises in KwaZulu-Natal, South Africa. *Problems and Perspectives in Management*, 14(2), 277–288. [https://doi.org/10.21511/ppm.14\(2-2\).2016.03](https://doi.org/10.21511/ppm.14(2-2).2016.03)
- Suliyanto, S., & Rahab, R. (2011). The Role of Market Orientation and Learning Orientation in Improving Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises. *Asian Social Science*, 8(1). <https://doi.org/10.5539/ass.v8n1p134>
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Tambunan, T. (2020). MSMEs IN TIMES OF CRISIS. EVIDENCE FROM INDONESIA. *Journal of Developing Economies*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.20848>
- UI, L., & Walandouw, P. . (2019). *Hasil Riset LD FEB UI Tahun 2018: GOJEK Sumbang Rp 44, 2 Triliun ke Perekonomian Indonesia*.

- Watumlawar, F. T. (2017). *Analisis Pengendalian Mutu Pada Proses Produksi Pemindangan Ikan Di UMKM Cindy Group*. Institut Pertanian Bogor.
- Wibawa, D. P., & Yusnita, M. (2019). Peran UMKM sebagai Penyangga Perekonomian Berbasis Kerakyatan. *Holistic Journal of Management Research*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/hjmr.v8i2>
- Wicaksono, T. Y. (2021). *Mandiri Institute : Sektor UMKM Lebih Adaptif Hadapi Pandemi*. <https://bankmandiri.co.id/en/news-detail?primaryKey=47753943&backUrl=/web/guest/news>
- Wulandary, A. (2018). *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Industri Umkm Abon Ikan Di Kota Makassar*. Institut Pertanian Bogor.
- Yanti, V. A. (2018). *Pengembangan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Bandung Dan Bogor*. Institut Pertanian Bogor.
- Yulianto, K. (2021). *Rancang Bangun Model Pembiayaan Tanpa Bunga Untuk Meningkatkan Daya Saing Agroindustri Tapioka*. Institut Pertanian Bogor.